





TERATUR: Salah satu titik parkir yang potensial di Sidoarjo kota.

## Pengelolaan Belum Beres, DPRD Minta Audit Titik Parkir

KOTA-Pengelolaan parkir di wilayah Sidoarjo masih belum menemukan titik terang. DPRD Sidoarjo meminta agar dilakukan audit mendalam terhadap titik-titik parkir yang dikelola oleh pihak tertentu. Di luar PT ISS yang menjadi pemenang lelang pengelolaan parkir.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo M Rojik menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat paripurna, Senin (3/7). Menurut dia, audit khusus tersebut perlu dilakukan.

"Untuk mengungkap potensi kerugian negara yang selama ini terjadi akibat pemungutan parkir yang tidak semestinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Rojik juga mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo untuk melakukan musyawarah dengan PT ISS sebagai pengelola parkir. Diharapkan dengan musyawarah tersebut, akan tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Menyikapi temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bupati Sidoarjo Ahmad Muh-

dlor berjanji akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. Muhdlor menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo diberi batas waktu selama 60 hari.

Tepatnya hingga 24 Juli, untuk menyelesaikan rekomendasi dari BPK, termasuk masalah pengelolaan parkir. Bupati Muhdlor juga menekankan bahwa selain masalah parkir, permasalahan administrasi lainnya juga akan ditangani secara serius.

Harapannya, kejadian semacam ini tidak akan terulang di tahun-

tahun berikutnya.

Terpisah dari proses audit dan rekomendasi BPK, terdapat proses hukum yang sedang berlangsung antara PT ISS dan Dishub Sidoarjo. Menanggapi hal itu, Muhdlor menyampaikan bahwa BPK bersedia membuka pintu konsultasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

"Kepala BPK Jatim sudah menyampaikan bahwa pintu kantor BPK selalu terbuka untuk berkonsultasi maupun hal lainnya," ujar Muhdlor. (nis/vga)



## Bahas Nasib 8.753 Tenaga Honorer Terkait Rencana Penghapusan

KOTA-Rencana penghapusan tenaga honorer di kantor pemerintahan yang akan dilakukan pada 28 November mendatang membuat nasib ribuan pegawai non ASN di Sidoarjo menggantung. Eksekutif dan legislatif pun duduk bersama dalam rapat dengan pendapat, Selasa (4/7) untuk menentukan nasib mereka.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Makhmud menyebutkan bahwa saat ini ada 8.753 pegawai non ASN yang bekerja di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai apakah mereka akan direkrut menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



SERIOUS: Komisi A DPRD Sidoarjo dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membahas nasib pegawai non ASN, Selasa (4/7).

Dia mengaku pihaknya sudah mengusulkan solusi masalah ini ke Badan Kepe-

gawaian Negara (BKN). Hingga kini masih menunggu petunjuk dari pemerintah

pusat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-

si (Kemendagri). "Semoga segera dapat berkonsultasi dengan pihak terkait di Jakarta untuk mendapatkan arahan lebih lanjut," ujarnya.

Menurut dia, petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat penting agar langkah-langkah terkait nasib ribuan pegawai non ASN dapat segera diambil sebelum akhir tahun ini. BKD sebenarnya telah menyiapkan beberapa alternatif solusi.

Utamanya adalah rekrutmen PPPK dan ASN. Solusi lainnya, alihdaya menjadi pegawai outsourcing. Hanya saja, pilihan alihdaya dapat diterapkan pada sekitar 2.300 pegawai saja. "Penge-mudi, kebersihan, dan security," ujarnya.

• Ke Halaman 10

## Status Belum Jelas

### ► Nasib 8.754 Pegawai Bukan ASN Sidoarjo

**SIDOARJO, SURYA** - Nasib ribuan pegawai non ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo belum jelas, menyusul rencana penghapusan tenaga honorer di kantor pemerintahan pada 28 November 2023 mendatang.

Terhitung ada 8.754 orang pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Apakah mereka bakal direkrut menjadi ASN atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), sampai sekarang juga belum jelas.

"Kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Kami juga berusaha usulkan ke BKN dan Kemendagri. Harapan kami, secepatnya juga ke Jakarta untuk konsultasi," kata Mahmud, Plt Kepala BKD

Sidoarjo saat hearing bersama Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (4/7/2023).

Menurutnya, petunjuk dari pemerintah pusat sangat penting agar segera bisa memetakan dan mengambil langkah terkait ribuan pegawai itu sebelum akhir 2023.

Mahmud juga menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa alternatif. Diantaranya, rencana rekrutmen PPPK dan ASN, serta alternatif alih daya menjadi pegawai outsourcing.

"Tapi untuk alih daya ini juga tidak bisa semua. Hanya sekitar 2.300 orang. Utamanya pegawai yang selama ini bertugas sebagai pengemudi atau sopir, pegawai keamanan, dan sebagainya," urainya.

Data di BKD menyebut, ribuan pegawai nonASN ter-

#### STORY HIGHLIGHTS

- Petunjuk dari pemerintah pusat sangat penting
- Berharap tidak ada yang diberhentikan
- Aturannya tidak boleh merekrut atau ada honorer

sebar di berbagai instansi. Paling banyak di DLHK ada 711 orang, Dinas Perhubungan 300 orang, Satpol PP 242 orang, ada 218 orang di DPBD, 213 orang di Dinas PU BMSDA, 197 di Disperindag, 182 di Dinsos, 105 di Dinas Cipta Karya, dan 103 di Dinas Pangan dan Pertanian.

Selain itu juga ada banyak lagi di instansi lain. Di Kecamat-

an, kelurahan, sekolah, GPT, PTT, dan berbagai instansi lainnya. Namun yang paling banyak memang di dinas-dinas tersebut," urai Mahmud.

Aturannya memang tidak boleh merekrut atau tidak boleh ada honorer. Tapi bukan berarti mereka ini di-PHK. Sehingga pemerintah berusaha melakukan penataan terhadap para pegawai non ASN tersebut.

"Dan jumlah pegawai non ASN itu harusnya di-breakdown lebih jelas. Masing-masing instansi, tugasnya, masa kerja sama dan sebagainya. Agar kebijakan yang diambil nanti bisa adil. Atau setidaknya mendekati keadilan," ujar Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Khudlori.

Pihaknya juga berharap,



**HEARING** - Suasana hearing BKD dengan Komisi A DPRD Sidoarjo untuk membahas masa depan ribuan pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Selasa (4/7).

8.753 itu tidak ada yang diberhentikan karena selama ini mereka sudah mengabdikan, bekerja dan dibutuhkan oleh Pemkab Sidoarjo.

"Jangan sampai akibat pe-

nanganan persoalan ini kurang tepat, malah pelayanan di Sidoarjo ambruk dan lantarannya kekurangan pegawai," harapnya.

Dicontohkan kondisi di

Kecamatan, sekolah, dan beberapa instansi yang banyak pegawai non ASN-nya. Jika semua diberhentikan, jelas pelayanan akan ambruk. (aib)

# Pemkab Kebut Proyek Betonisasi Jalan Desa

**SIDOARJO (BM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menggebut pengerjaan proyek betonisasi jalan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memastikan ada sembilan proyek jalan beton saat ini yang disebut pengerjaannya mulai bulan Juli dan Agustus Tahun 2023 mendatang.

Ada lima ruas jalan yang mulai dikerjakan bulan Juli. Kelima ruas jalan itu yaitu jalan Desa Banjarsari-Damarsi Kecamatan Buduran, jalan Desa Kwangsari Kecamatan Sedati, jalan Desa Tropodo Kecamatan Waru, jalan Desa Tarik-Mlirip Kecamatan Tarik serta jalan Geluran-Suko Kecamatan Taman.

"Sedangkan empat ruas lainnya mulai dikerjakan di bulan Agustus, yakni ruas jalan Krembung-Mojoruntut, jalan Desa Banjarpanji, jalan Desa Tulangan - Durungbedug Kecamatan Candi, dan jalan

Desa Bringinbendo-Tanjungsari Kecamatan Taman," ucapnya, Senin (3/7).

Bupati menjelaskan untuk jalan yang dibeton tersebut ada jalan yang dilakukan pelebaran. Seperti di ruas jalan Desa Banjarsari-Damarsi Kecamatan Buduran. Jalan dengan panjang 1,8 km itu sebelumnya hanya sekitar 3,5 meter bakal dilebarkan menjadi 5 meter.

Hal yang sama juga dilakukan di ruas jalan Bringinbendo-Tanjungsari Kecamatan Taman yang bakal dilebarkan menjadi 5 meter. Jalan Geluran-Suko lebarnya 6-7 meter. "Kemudian ruas Jalan Krembung-Mojoruntut lebarnya sampai 5-6 meter. Pelebaran dilakukan untuk memperlancar arus kendaraan yang lewat terutama kendaraan roda empat saat berpapasan," tambah Gus Muhdlor.

Alumni FISIP Unair Surabaya itu mendorong percepatan pengerjaan proyek betonisasi sesuai dengan target pekerjaan. Ia meminta pekerjaan di sembilan

titik jalan beton itu rampung tepat waktu. "Selain harus tepat waktu, saya minta pengawasannya dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air diperkuat. Rampung sesuai target tapi harus sesuai perencanaan," tegasnya.

Bupati peraih anugerah pemimpin perubahan dan tokoh penggerak pembangunan infrastruktur itu menyampaikan bahwa sembilan ruas jalan yang dibeton tersebut merupakan jalan yang padat dilalui kendaraan. Seperti ruas jalan Tarik-Mlirip merupakan akses jalan alternatif yang menghubungkan Sidoarjo dan Mojokerto.

"Ruas jalan Tulangan-Durungbedug juga padat sekali saat pagi dan sore hari. Karena jalan ini jalan alternatif warga Tulangan menuju kota Sidoarjo. Begitu juga ruas jalan Bringinbendo-Tanjungsari dimana jalan ini selalu padat kendaraan para pekerja dan anak sekolah," urai Gus Muhdlor.

Sementara itu Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Pemkab Sidoarjo, Rizal Ansan menyampaikan progres pekerjaan betonisasi di sembilan ruas jalan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Seperti, ruas jalan Banjarsari-Damarsi sudah mulai pemasangan pemasangan batu penahan. Ruas Tarik-Mlirip mulai dilakukan peninggian pemasangan batu dan peninggian badan jalan. "Kemudian ruas jalan Tulangan-Durungbedug mulai pemasangan batu dan menunggu kedatangan material U-Ditch," ujar Rizal.

Rizal mengaku sejauh ini tidak ada kendala di lapangan. Meski begitu pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat pekerjaan di lapangan terutama dalam hal kualitas yang harus sesuai dengan perencanaan.

"Dari lima ruas yang dikerjakan mulai bulan Juli ini tidak ada kendala, semua sudah on track. Sisanya yang empat titik mulai dikerjakan pada Agustus. Pekerjaan kita pantau tiap saat, prinsipnya proyek jalan beton selesai tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan," jelas Rizal. (udi)



BM1ST

**DIKEBUT:** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menggebut pengerjaan proyek betonisasi jalan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan.

## Emoh Berpolemik dengan PT ISS, Kadishub: Kita Selesaikan di Pengadilan

Sidoarjo, Pojok Kiri

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Benny Airlangga Yogaswara mengatakan tak mau berpolemik dengan PT Indonesia Sarana Service (PT ISS) terkait sengketa pengelolaan parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus yang mereka kerjasamakan sejak awal 2022 lalu.

“Sebaiknya nggak usah. Masalah ini khan sudah masuk ke ranah hukum, jadi biar diselesaikan saja di pengadilan. Toh nanti kan ada ruang bagi kami untuk bermediasi,” kata Benny saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (3/7)

Lebih lanjut dikatakannya, ada dua lembaga peradilan yang saat ini menangani kasus sengketa tersebut. Yang pertama di PTUN setelah PT ISS melayangkan gugatan terhadap surat penghentian kerjasama yang dikeluarkan Dishub Sidoarjo pada 2 Januari 2023 lalu.

“Sidangnya masih berjalan sampai saat ini. Kalau nggak salah besok (Selasa, 4/7) ada sidang lagi. Agendanya penyerahan berkas-berkas pendukung dari kedua belah pihak,” sebut mantan Asisten II Sekda Sidoarjo itu.

Yang kedua adalah gugatan perdata yang kali ini dilayangkan oleh Dishub Sidoarjo melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat. Materi gugatannya, menuntut PT ISS



untuk segera membayarkan imbal jasa layanan sebesar Rp 32,09 Miliar ke kas daerah sebagaimana kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak pada 25 April 2022 lalu.

“Tadi pagi proses sidang perdananya di PN Sidoarjo sudah. Minggu depan (Senin, 10/7) dilanjut lagi dengan agenda mediasi. Lha nanti disitu khan kami bisa ketemu. Itu saja dulu,” pungkas Benny.

Pernyataan ini disampaikan saat dikonfirmasi terkait ‘nyanyian sumbang’ yang disuarakan Direktur Operasional PT ISS, Dian Sutjipto melalui beberapa media massa usai mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Sabtu (1/7) kemarin lusa.

Saat itu para legislator tengah membahas laporan pertanggungjawaban bupati Sidoarjo terkait kinerjanya di tahun anggaran 2022. Salah satu materinya adalah belum masuknya aliran dana dari PT ISS yang seharusnya

menyetor ke kas daerah sebesar Rp 16 miliar lebih atau separuh dari nilai kontrak di tahun pertama.

Di forum itulah Dian mengisahkan riwayat kerjasama dengan Pemkab Sidoarjo itu secara kronologis. Termasuk soal tidak terpenuhinya 359 titik parkir di wilayah kota delta sebagaimana dituangkan dalam PKS tadi yang didasarkan pada SK Bupati no 188/2021.

Karena itu, menurut Dian, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Sidoarjo menjanjikan akan segera melakukan addendum materi PKS, khususnya terkait jumlah titik parkir dan pengelolannya diserahkan ke PT ISS termasuk koreksi besaran nilai rupiah yang harus disetorkan ke kas daerah.

Namun faktanya hingga saat ini janji addendum itu tak kunjung terpenuhi sehingga PT ISS tidak bisa memenuhi nilai setoran tersebut. “Kami sudah siap memberikan setoran sebanyak yang memang kami kutip dari lapangan, tapi Dishub menolak,” pungkasnya. (Nang)

# PEMILU

## 804 Bacaleg Belum Lengkapi Syarat Administrasi

**SIDOARJO** – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo menyatakan, hingga kemarin (4/7) masih ada 804 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang belum melengkapi syarat administrasi. Mereka diberi waktu hingga 9 Juli untuk menyelesaikannya.

Komisioner KPU Sidoarjo Ana Aziza mengungkapkan, total ada 817 bacaleg dari 18 partai politik yang ikut pemilu tahun depan. Setelah verifikasi administrasi, ditemukan ratusan bacaleg yang belum dokumennya lengkap. "Hasilnya, hanya 13 bacaleg yang dinyatakan lolos," ujarnya kemarin (4/7).

KPU memberikan waktu bagi mereka untuk melengkapi berkas administrasi yang belum ada. Misalnya, surat keterangan sehat dari rumah sakit hingga surat keterangan bebas pidana dari pengadilan negeri. Ada juga dokumen yang belum jelas. Misalnya, identitas diri seperti e-KTP yang rusak, baik bentuk fisiknya maupun foto yang memudar sehingga tidak terlihat jelas. (fur/c7/any)

**Jawa Pos**

## HUT Bhayangkara Ke-77



10/11/2023

Kedatangan Forkompimka berusapan selamat HUT Bhayangkara ke-77 ke Mapolsek Candi Selasa (4/7/23)

## Kejutan Kapolsek Candi dari Forkopimka

**SIDOARJO** - Di hari ulang tahun Bhayangkara yang ke -77, Kapolsek Candi dan jajaran mendapat surprise. Hal ini lantaran kedatangan kunjungan Forkopimka Candi diantaranya Danramil dan Camat Candi Selasa (4/7/23). Rombongan datang ke Mako Polsek Candi Jl. Raya Candi No.3 Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo.

Hari Bhayangkara ke-77 yang tepat jatuh Sabtu (1/7/23) diperingati secara serentak dan

diwarnai dengan berbagai kegiatan, juga sebagai ucapan selamat untuk jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut diantaranya Polsek Candi.

Kedatangan Danramil Candi Kapten Inf. Siswanto bersama anggota dan Camat Candi Luchman Sanjaya beserta Sekcam ta k lain memberikan kejutan ucapan Selamat hari ulang tahun Bhayangkara Ke-77 semoga Polri tetap jaya,jaya,jaya ucap Danramil dan Camat diikuti anggota.

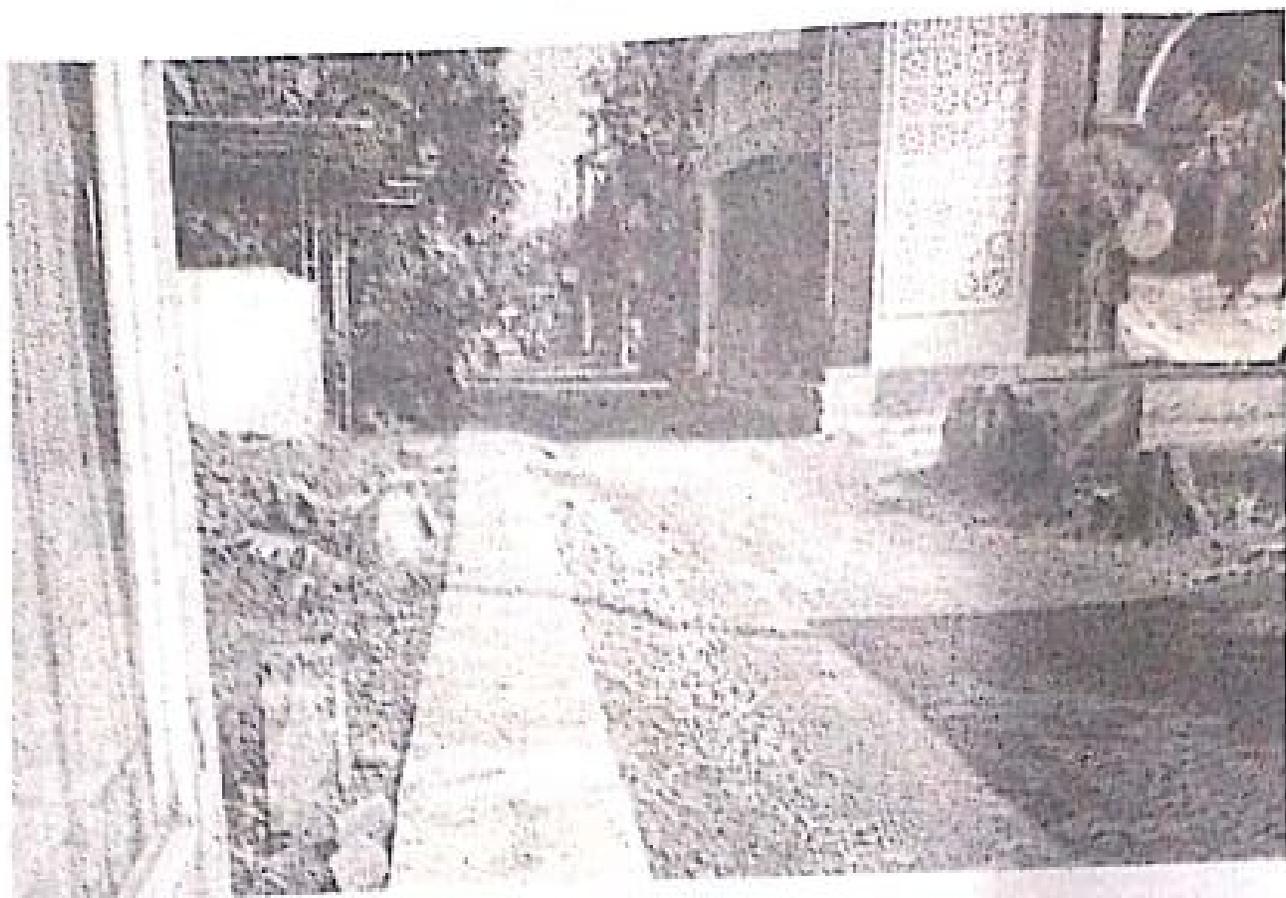
Kapolsek Candi Kopol Drs. Soegeng Prajitno bersama Anggota Polsek Candi menerima kunjungan Forkopimka Kec. Candi ke Kantor Polsek Candi dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 77.

"Terima kasih atas kunjungannya, khususnya rombongan Forkopimka dan ucapan HUT Bhayangkara ke -77 ke Polsek Candi," ujar Kapolsek Candi Kopol Soegeng.

Senada Plh.Kasi Humas Polsek Candi Bripka Junaidi kepada duta.co Selasa (4/7/23) menambahkan, benar kami kedatangan rombongan Forkopimka diantaranya Danramil dan Camat Candi beserta staf dan jajaran.

"Kami merasa terharu dan berterima kasih atas kunjungan ini, yang disertai dua buah tumpeng sebagai bentuk dan menandakan perhatian kepada kami, khususnya di HUT Bhayangkara ke -77 ini, khususnya ke Polsek Candi,"pungkas Bripka Junaidi.

Hadir dalam kunjungan Danramil Candi,Camat dan Sekcam Candi beserta sedikitnya 24 personil dari anggota Koramil dan staf Kec. Candi. • Loe



## Pemdes Simoangin Angin Bangun Saluran Air Pemukiman

**Sidoarjo, Pojok Kiri**

Pembangunan fisik maupun non fisik Desa SimoAngin Angin Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dari waktu ke waktu terus dilaksanakan. Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Simoangin angin melaksanakan pembangunan saluran drainase yang dibiayai APBDes. Pembangunan saluran pembuangan air dari warga berada di RT/12 -13 menggunakan bahan dari box culvert menghabiskan anggaran Rp.127 juta. kata Kepala Desa Simoangin angin," Kusnadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan drainase tersebut, menjadi prioritas dibangun tahun ini, karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir di pemukiman warga. "Sebab, setiap musim hujan warga kerap dipusingkan oleh genangan air baik dikekarangan rumah maupun

Kali ini genangan air akan cepat mengalir di badan jalan. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan akan melancarkan saluran air, dan genangan air akan cepat kering, ujarnya. Pembangunan tersebut kata, Kusnadi pelaksananya dari tim pelaksana kegiatan desa TPK dan pemberdayaan masyarakat mulai dari tenaga kerja demi menyerap tenaga sekitar desa baik penggalian saluran maupun pemasangan box culvert, pemanfaatan langsung menyentuh pada warga, jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan drainase ini mendapat sambutan positif terutama dari warga RT)12 karena, usulan warga melalui musyawarah desa [Musdes] terealisasi dengan baik sehingga bisa terwujud. Dengan adanya APBDes, sangat membantu pembangunan fisik Desa untuk menggenjot pembangunan infrastruktur agar merata, guna meningkatkan geliat perekonomian warga imbuhnya.

Saya berharap, semoga pembangunan drainase ini, dapat membawa manfaat maksimal pada warga." Jadi kalau bangunan bertahan lama, kami pemerintah Desa juga ikut merasakan manfaat dari bangunan ini. Oleh karena itu dalam mengerjakan kita laksanakan sebaik mungkin.

Kami juga mengerjakan pembangunan saluran air di beberapa titik pemukiman dengan menggunakan anggaran dana desa DD tahun 2023 semuanya sudah rampung dikerjakan. Kami fokus membenahi saluran air dan jalan pemukiman mengingat Desa Simoangin angin dikala musim penghujan air menggenangi sebagian pemukiman. (Lie/Khol)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Direktur SAKA : Realisasi Pendapatan Minim dan Tak Sebanding

**SIDOARJO** - Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 5.210.597.374.474,00. APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perda tersebut menetapkan ketiga komponen APBD Kabupaten Sidoarjo yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.76 Triliun, Belanja Daerah sebesar Rp 5.21 Triliun dan pembiayaan sebesar Rp 447 Miliar. Hal ini disampaikan Basith Direktur Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran (SAKA) Indonesia.

Basith menyoroti realisasi dari Pendapatan dan Belanja Daerah yang saat ini sudah memasuki triwulan ketiga di tahun berkenaan, menurutnya anggaran pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, realisasinya masih minim yaitu 35.96% dan Belanja Daerah 30.69%.

"APBD kan soal hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, jika kewajiban masyarakat selalu ditekan dengan tujuan mencapai target dalam pendapatan daerah maka juga harus diimbangi dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat," kata Basith, Selasa (4/7/23) kepada *duta.co*.

Basith mengungkapkan ketidakseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah, khususnya di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa realisasi PAD justru lebih tinggi sebesar 38.50% atau sekitar 745,08 M. dibandingkan Belanjanya yang hanya mencapai 30.69%.

"Tidak usah terlalu jauh membandingkan pendapatan daerah kita yang masih tinggi ditopang oleh transfer pemerintah pusat dan pendapatan lainnya, kita lihat aja per 1 Juli 2023 realisasi PAD kita sudah mencapai 1860%," ungkapnya.

Pemuda asal Waru tersebut sangat menyayangkan bilamana pemerintah



LOETFI/DUTA

Basith Direktur Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran (SAKA) Indonesia.

Hak Pemerintah sedangkan Belanja adalah Hak Masyarakat dan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo.

"Ini menjadi percuma jika Sidoarjo memiliki Bupati dengan kinerja "Sat-Set" jika tidak ditopang dengan kinerja bawahannya. Perangkat Daerah saat ini kan tidak lagi berencana tapi sudah ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kan tinggal laksanakan itu tapi tetap sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Disisi lain, ketika ditanya soal pengelolaan parkir yang saat ini menjadi perbincangan hangat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Ia menyatakan pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan Swasta itu terlalu memaksakan diri, sebab tidak ada dasar hukum yang jelas yang mengatur.

"Itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas ya akhirnya Bupati menggunakan kewenangan Diskresi, kalau soal kepala dinas perhubungan, saya duga telah menyetorkan data yang tak sesuai mengenai titik lokasi parkir kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan SK Bupati," katanya.

Basith juga menyebutkan, bahwa

kabupaten Sidoarjo masih kesana kesini selalu membicarakan tentang pendapatan daerah di ruang publik tanpa menyinggung kewajibannya terhadap masyarakat yaitu Belanja Daerah.

Sebab, masih kata Basith, Pendapatan Daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan

skema apapun yang digunakan oleh Pemkab Sidoarjo jika implementasi sebuah kebijakan dari pengelolaan parkir tersebut tidak tepat maka hasilnya juga tidak akan maksimal, ia mencontohkan dengan skema parkir berlangganan yang saat itu menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD dari sektor retribusi. ● loe

## DUTA

### Bahas Nasib 8.753...

Data dari BKD menunjukkan bahwa ribuan pegawai non ASN tersebar di berbagai instansi di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah paling banyak berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan 711 orang, Dinas Perhubungan 300 orang, Satpol PP 242 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 218 orang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air

(PU BMSDA) 213 orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 197 orang, Dinas Sosial (Dinsos) 182 orang, Dinas Cipta Karya 105 orang, dan Dinas Pangan dan Pertanian 103 orang.

Lebih lanjut, Mahmud menyatakan bahwa masih banyak lagi pegawai non ASN yang bekerja di instansi lain seperti kecamatan, kelurahan, sekolah, dan berbagai instansi lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar berada di dinas-dinas yang telah dise-

butkan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menekankan pentingnya melakukan penataan dan pemetaan secara jelas terhadap jumlah pegawai non ASN di setiap instansi.

Termasuk tugas-tugas yang mereka emban dan masa kerja sama yang telah berlangsung. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil nantinya dapat lebih adil atau setidaknya mendekati keadilan.

Pihak DPRD Sidoarjo juga berharap bahwa dari total 8.753 pegawai non ASN tersebut, tidak ada satu pun yang harus diberhentikan.

"Karena mereka telah memberikan pengabdian dan kontribusi yang dibutuhkan oleh Pemkab Sidoarjo selama ini," imbuhnya.

Dalam menyikapi masalah ini, dia mencontohkan kondisi di kecamatan, sekolah, dan beberapa instansi lain yang memiliki banyak pegawai non ASN.

Jika semua pegawai tersebut harus diberhentikan, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif pada pelayanan di Kabupaten Sidoarjo karena akan mengalami kekurangan pegawai.

Hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk menetapkan langkah selanjutnya guna menangani nasib ribuan pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. (nis/vga)